

Forum Group Discussion (FGD)

Arah Kebijakan & Strategi Pengarusutamaan Perubahan Iklim, Kebencanaan, dan Gender dalam *Midterm* Reviu Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

28 Oktober 2022

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* Arah Kebijakan & Strategi Pengarusutamaan Perubahan Iklim, Kebencanaan, dan Gender dalam *Midterm* Reviu Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 secara *hybrid* pada tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di Hotel Mercure Tangerang BSD City. Sementara, penyelenggaraan secara daring dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* dengan *Meeting ID: 861 862 8699* *Passcode: jakstranas*.



Pokok-pokok bahasan dari penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain:

- Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam **perumusan arahan kebijakan** dari Renstra Kementerian PUPR **hingga tahun 2024**, khususnya yang berkaitan dengan isu pengarusutamaan **perubahan iklim, kebencanaan, dan gender**. Selain itu, diperlukan juga **skema dan alternatif pembiayaan** dalam pengembangan infrastruktur yang tangguh dan responsif terhadap isu-isu tersebut. Hasil dari FGD ini juga diharapkan dapat memberi catatan dan masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam **penyusunan Renstra di periode mendatang**.
- Hasil penandaan anggaran perubahan iklim di 11 lokasi piloting Pemda tahun 2017-2020, rata-rata anggaran perubahan iklim mencapai **Rp 3,01 triliun** per tahun. Anggaran mitigasi rata-rata **Rp 1,19 triliun** per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata **Rp 1,82 triliun** per tahun. Sekitar 61% anggaran perubahan iklim diarahkan untuk adaptasi, dan 39% untuk mitigasi.

- Untuk monev PUG sebaiknya masing-masing unit organisasi menyusun, karena kegiatannya berbeda-beda. Yang perlu dimonev bisa dilihat dari dokumen GAP untuk melihat kegiatan serta isu-isunya apakah dari aspek Akses, partisipasi, control dan manfaat.
- Komposisi SDM di dalam Renstra, sebaiknya dipilah jenis kelamin dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Data Terpilah. Hal ini juga sering ditanyakan dalam Evaluasi pelaksanaan PUG oleh Kementerian, dimana perlu adanya informasi tentang data yang dipilah menurut jenis kelamin atau bahkan penyandang disabilitas.
- Usulan mengenai bagaimana mekanisme agar indikator PUG menjadi lebih terukur.
- Peluang mengenai pembiayaan inovatif perubahan iklim melalui *Green Sukuk* untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.
- Masih banyak yang rancu dengan istilah Adaptasi dan Mitigasi untuk membedakannya dalam pengelompokan kegiatan.
Adaptasi : Upaya untuk meningkatkan kemampuan
Mitigasi : Upaya pengendalian untuk mengurangi resiko
- Cipta Karya memang tidak mempunyai tuisi untuk membuat RTH, namun Ruang Publik perlu menjadikan perhatian untuk dibangun di perumahan padat. RTH lebih bersifat menangani dampak lingkungan sebagaimana tertuang dalam UU Penataan Ruang , yaitu sebesar 30% . Sedangkan Ruang Publik lebih untuk mengatasi masalah social, sebagai ruang ineraksi social. Ruang Publik sendiri sudah dikerjakan oleh Cipta Karya yang diintegrasikan dalam Program KOTAKU.
- Seluruh materi narasumber yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diunduh <http://bit.ly/ArahKebijakanPengarusutamaan>.